

BAB IV

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI AGRESI MILITER BELANDA II

A. Perjanjian Renville

Pada tanggal 20 Juli 1947 Belanda mengingkari Perjanjian Linggarjati yang telah disepakati bersama. Pelanggaran ini dibuktikan dengan adanya serangan militer yang dikenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama. Terjadinya peristiwa ini membuat Dewan Keamanan PBB turun tangan dengan membentuk *Committee of Good Offices* (Komisi Jasa Baik) yang terdiri wakil-wakil dari AS, Australia dan Belgia dalam upaya penyelesaian masalah tersebut. Komisi ini juga disebut dengan Komisi Tiga Negara (KTN)¹

Mula-mula mereka berusaha mengenal dan memahami keadaan dan persoalan yang akan mereka hadapi. Untuk itu berdasarkan keputusan Dewan Keamanan, mereka menggunakan jasa para Konsul beserta peninjau-peninjau militer untuk menyusun laporan yang disampaikan dan diterima Dewan Keamanan tanggal 14 Oktober 1947. Pada tanggal 27 Oktober 1947 anggota-anggota Komisi Jasa Baik tiba di Jakarta. Sementara itu pihak Republik Indonesia tidak bersedia mengadakan pertemuan dengan Belanda di

¹ Masing-masing anggota KTN adalah Frank Graham (Amerika), Richard Kirby (Australia), dan Paul Van Zeeland (Belgia). Kelak anggota dari masing-masing negara ini mengalami pergantian.

Yogyakarta atau di Jakarta. Pihak Republik hanya bersedia mengadakannya di tempat yang netral.²

Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), *Committee of Good Offices for Indonesia*, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Secara garis besar Persetujuan Renville tersebut terdiri dari 3 naskah, yaitu sebagai berikut.

1. Persetujuan gencatan senjata yang antara lain berisi ketentuan diterimanya garis demarkasi Van Mook.
2. Dasar-dasar Politik Renville yang pada pokoknya berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian mereka dengan jalan damai dan dengan bantuan KTN.
3. Enam pasal tambahan dari KTN yang antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan atas Indonesia tetap di tangan Belanda selama masa peralihan sampai kemudian kedaulatan diserahkan kepada pihak NIS (Negara Indonesia Serikat).

² K.M.L. Tobing, *Perjuangan Politik Bangsa Indonesia : Renville*. Jakarta : Gunung Agung, 1986, hlm. 24.

Persetujuan Renville yang ditandatangani oleh wakil-wakil RI-Belanda tanggal 17 Januari 1948 semakin diingkari oleh Belanda. Persetujuan antara Belanda dengan RI dalam menyelesaikan pertikaianya oleh Belanda hanya merupakan waktu untuk memperkuat dan memusatkan kekuatannya kembali setelah mulai terdesak oleh serangan-serangan pasukan RI, maksud Belanda sudah jelas yaitu ingin menghancurkan RI dan Belanda kembali menjajah RI. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Perdana Menteri Amir Syarifuddin Harahap. Delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh Kolonel KNIL R. Abdul Kadir Wijoyoatmojo. Delegasi Amerika Serikat dipimpin oleh Frank Porter Graham.

Dewan keamanan PBB membentuk komisi yang dinamakan Komisi Tiga Negara (KTN) sejak Agustus 1947. Komisi itu bertugas untuk mencari dan meminta pensapatan dari Indonesia dan Belanda untuk menyelesaikan sengketanya. Indonesia menyambut kedatangan komisi itu dengan harapan bercampur keraguan, apakah diperoleh persetujuan yang baik dengan perantara KTN. Sedangkan Belanda menyambut komisi itu dengan kecewa dan terpaksa. Belanda tidak ingin menghadapi tuduhan bahwa Belanda ingin menjajah Indonesia kembali.

Perundingan dibuka pada tanggal 8 Desember 1947 di atas kapal pengangkut Angkutan Laut AS *Renville* diteluk Jakarta.³Indonesia meminta agar perundingan tersebut tidak dilakukan di jakarta atau di tempat lain,

³. Himawan Soetanto, *Yogyakarta 19 Desember 1948 Jendral spoor versus Jendral Sudirman*. Jakarta: Pustaka Antara 2006 ,hlm .103.

melainkan di daerah netral, masalah rusial yang perlu disepakati oleh kedua belah pihak adalah terlebih dahulu diadakan gencatan senjata sebagai prasyarat perundingan politik. Pada sidang tanggal 9 Desember 1947, KTN mengajukan skema persetujuan garis demarkasi efektif pada delegasi Belanda dan indonesia. Dalam skema ini diusulkan agar tentara Belanda mengosongkan berbagai daerah yang diduduki dan sebaliknya.

Perjanjian *Renville* telah melahirkan negara-negara boneka setelah berhasil membentuk 15 negara bagian, Van Mook bertindak sebagai Presiden pemerintahan sementara yang berbentuk Federal dan bermaksud mendirikan Negara Indonesia Serikat tanpa persetujuan Republik Indonesia. Keadaan Republik sendiri sangat memprihatinkan dengan inflansi yang meningkat tajam. Tetapi keadaan ini dibarengi dengan hasil petani yang semakin membaik sehingga terjadilah pemerataan pendapat.

Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia dan seterusnya dinamai pihak-pihak, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut.

- a. Dengan segera setelah perjanjian ini ditandatangani, kedua belah pihak akan mengeluarkan perintah menghentikan tembak menembak dalam tempo 48 jam. Perintah ini akan berlaku atas pasukan-pasukan kedua belah pihak, pada sebelah tempat masing-masing yang telah diterangkan dalam pengumuman dari Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 29 Agustus 1947, garis-garis tersebut dinamakan garis *status quo* dan di daerah-daerah termaktub dalam ayat yang berikut.

- b. Dalam instansi pertama dan untuk sementara akan diadakan daerah-daerah sesuai dengan garis *status quo*, sebagai kebiasaan daerah-daerah ini melingkungi garis-garis *status quo* pada sebelah pihak, garis dari pihak Belanda yang terkemuka dan pada pihak lain, garis dari pihak Republik yang paling depan, sedang lebarnya sesuatu daerah harus sama.
- c. Mengadakan daerah-daerah yang tidak diduduki oleh militer sekali-kali tidak menyangkut hak dari kedua belah pihak menurut resolusi dari Dewan Keamanan pada tanggal 1, 25 dan 26 Agustus dan tanggal 1 November 1947.
- d. Setelah yang tertulis di atas diterima oleh kedua belah pihak, maka Komisi akan menyerahkan pembantu-pembantu militernya kepada kedua belah pihak, sedang pembantu-pembantu tersebut akan menerima petunjuk-petunjuk dan menerima pertanggungjawaban untuk menentukan, apakah penyelidikan atas sesuatu insiden diperlukan oleh pembesar-pembesar dari satu atau kedua pihak.
- e. Sambil menunggu keputusan dalam soal politik, tanggung jawab atas tertib tentram dan keselamatan jiwa dan harta benda penduduk dalam daerah-daerah yang dikosongkan akan dipegang oleh polisi sipil dari kedua belah pihak. Polisi untuk sementara waktu, memakai tenaga personal militer sebagai polisi sipil dengan perjanjian, bahwa kekuasaan polisi di bawah kontrol sipil. Pembantu-pembantu militer dari Komisi setiap waktu bersedia memberi nasehat kepada kedua belah pihak dan menyerahkan tenaganya bila dianggap perlu. Diantaranya mereka itu mesti berikut ini.

- 1) Mendapat bantuan dari opsir-opsir Polisi, yang ditempatkan oleh salah satu pihak dalam tempat-tempat yang tidak diduduki lagi oleh militer untuk menemani mereka itu dalam menyelenggarakan kewajiban mereka. Opsir-opsir polisi dari satu pihak tidak dibenarkan berada di daerah pihak lainnya, kecuali bersama-sama dengan pembantu militer Komisi dan opsir polisi dari pihak lain.
 - 2) menambah kerja sama antara kedua belah pihak polisi.
- f. Perdagangan dan lalu lintas antara daerah-daerah diusahakan supaya lebih maju dan meningkat pada hal-hal yang perlu, maka kedua belah pihak akan mengadakan perjanjian di bawah pengawasan Komisi dan wakil-wakilnya, bilamana hal ini dirasa perlu.
- g. Perjanjian ini juga memuat hal-hal sebagai tertulis di bawah ini, yang mana dasar-dasarnya telah disetujui oleh kedua belah pihak sebagai berikut.
- 1) Dilarang mengadakan sabotase, menakut-nakuti, pembalasan dendam dan lain-lain tindakan yang serupa terhadap orang-orang dan harta benda, baikpun perusahaan atau barang-barang apa saja dan tiap-tiap orang dan memakai alat-alat apa saja, supaya mencapai maksud tersebut.
 - 2) Tidak akan mengadakan siaran-siaran radio atau propaganda yang lain untuk menentang atau mengacaukan tentara dan rakyat.

- 3) Siaran-siaran radio dan lain-lain untuk maksud memberi tahu kepada tentara dan rakyat tentang kesukaran-kesukaran dan untuk menepati pasal-pasal yang tersebut dalam sub a dan b.
 - 4) Memberikan segala kesempatan untuk penyelidikan oleh pembantu-pembantu militer dan sipil, yang diperbantukan pada KTN.
 - 5) Penghentian dengan segera penyiaran pengumuman harian tentang gerakan-gerakan atau macam pemberitahuan tentang gerakan ketentaraan, kecuali jika sebelumnya telah disetujui dengan tulisan oleh kedua belah pihak, tidak termasuk penyiaran-penyiaran minggu dari daftar orang-orang (dengan menyebut nama, nomor, kenyataan dan alamat rumah), yang tewas atau meninggal karena luka-luka yang didapatnya dalam menjalankan kewajiban.
 - 6) Penerimaan atas pembebasan tawanan-tawanan dari kedua pihak dan pemulaian perundingan tentang sesuatu pengwujudan yang secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya, pembebasan mana dalam asasnya akan berlaku dengan tidak mengingat pada jumlah tawanan kedua pihak.
- h. Bahwa, setelah menerima hal tersebut tadi, pembantu-pembantu militer Komisi itu akan segera mengadakan penyelidikan untuk menentukan apakah atau di mana, terutama di Jawa Barat, kesatuan-kesatuan tentara Republik mengadakan perlakuan di belakng kedudukan terdepan dari tentara Belanda yang sekarang. Jika penyelidikan itu membuktikan adanya kesatuan-kesatuan yang semacam itu, maka kesatuan-kesatuan itu secepat

mungkin, tapi bagaimanapun juga dalam 21 hari, akan mengundurkan diri secara yang disebutkan dalam pasal berikut.

- i. Bahwa seluruh kekuatan tentara dari kedua pihak masing-masing dalam sesuatu daerah, yang diterima sebagai daerah yang didemiliterisasi, atau dalam sesuatu daerah di bawah daerah yang didemiliterisasi dari pihak yang lain, akan mengundurkan diri, di bawah pengawasan pembantu militer Komisi itu dengan membawa senjatanya dan keperluan bertempur, dengan tenang menuju daerah yang didemiliterisasi. Kedua pihak berjanji akan melancarkan pengungsian kekuatan tentaranya masing-masing dengan cepat dan tenang.

Persetujuan ini dipandang masih memikat selama waktu empat belas hari dan selalu dengan sendirinya diperpanjang dengan empat belas hari, kecuali jika salah satu pihak memberitahukan pada KTN dan pada pihak lain, yang berpendapat, bahwa peraturan-peraturan gencatan senjata tidak ditaati oleh pihak yang lain dan oleh karenanya persetujuan itu hendaknya diakhiri pada akhir waktu empat belas hari yang berlangsung.

Tanggal 1 November 1948 Van Mook digantikan oleh Dr. Beel sebagai Wakil Tinggi Mahkota Belanda. Pergantian Van Mook oleh Dr. Beel tidak dapat mengatasi perundingan penyelesaian pertikaian antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 4 Desember 1948 wakil Presiden Drs. Moh. Hatta dalam suatu keterangannya bahwa situasi antar RI dengan Belanda sudah sangat buruk sekali, wakil Presiden mengatakan bahwa situasi sekarang sama seperti situasi pada tanggal 21 Juli 1947.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, bangsa ini selalu terancam dengan kembalinya kolonialisme bangsa asing. Peranan Sri Paku Alam VIII dalam Agresi Militer Belanda II sangat besar, sejak perjuangan kemerdekaan, pada saat Yogyakarta sebagai Ibu Kota RI. Beliau adalah seorang pribadi yang *sepi ing pamrih rame ing gawe*, yang artinya Sepi dalam pamrih dan cekatan dalam pekerjaan.⁴

Perundingan dengan perantaraan KTN baru bisa dimulai kembali pertengahan Maret 1948, hal ini dikarenakan kelambatan Belanda menunjuk wakilnya untuk berunding dengan RI. Penundaan ini sepertinya disengaja dan ada hubungannya dengan pendirian negara-negara bagian yang telah dirampas Belanda dari RI, yaitu Madura, Pasundan, Sumatera Timur dan Sumatera Selatan. Pendirian negara-negara bagian itu disertai pula dengan pendirian pemerintah Federal Sementara yang disponsori oleh Belanda. Pihak RI menuduh Belanda telah melanggar Persetujuan Renville, begitu pula dengan Belanda yang telah menuduh RI melanggar persetujuan karena RI terus memperluas hubungan dengan luar negeri.⁵

Pada bulan Juli pihak Belanda membentuk Majelis Permusyawaratan Federal (*Bijeenkomst voor Federale Overleg/ BFO*) yang terdiri dari pemimpin-pemimpin negara federal tersebut. Mereka bermaksud membentuk suatu Negara Indonesia Serikat yang berbentuk federal dengan atau tanpa

⁴ Tashadi, *Sejarah Kemerdekaan (1945-1949) di DIY*. Jakarta: 1986.hlm.72

⁵ Moedjanto, *op. cit.*, hlm. 25.

persetujuan Republik Indonesia.⁶ Keadaan di dalam Republik di Jawa pada tahun 1948 sangat kacau. Kekuasaan RI semakin sempit sedangkan penduduk bertambah akibat masuknya penduduk dari daerah luar Republik yang harus ditinggalkan. Penderitaan semakin parah dengan adanya blokade oleh Belanda dan penduduk pun kekurangan beras.

Macetnya perundingan karena kebuntuan yang dialami membuat KTN mengusahakan kembali agar perundingan dapat dibuka. Wakil dari AS yang baru, Merle Cochran mengajukan rencana penyelesaian yang kemudian dikenal dengan Rencana Cochran. Secara garis besar nota tersebut berisi sebagai berikut:

1. Mempertahankan hubungan luar negeri Republik
2. Seluruh angkatan perang serta seluruh perangkatnya termasuk tentara Kerajaan Belanda yang ada di Indonesia, ditempatkan di bawah kekuasaan Pemerintah Serikat
3. Utang - utang Hindia Belanda kepada Belanda, yang dibuat setelah tahun 1942 akan dirundingkan cara pengembaliannya.⁷

RI kecewa dengan usul Cochran karena dianggap telah mengorbankan sejumlah kepentingan RI sedangkan Belanda belum puas karena belum

⁶ M.C. Ricklefs, A History of Modern Indonesia, a.b. Dharmono Hardjowidjono, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1991, hlm. 341.

⁷ Tobing, *op. cit.*, hlm. 133.

dianggap memadai. Hal ini mengakibatkan usaha Merle Cochran telah gagal. Perundingan RI dengan Menlu Belanda Stikker secara langsung pun telah gagal. Dengan kondisi yang demikian itu maka Belanda pada tanggal 11 Desember 1948 menyatakan bahwa kemungkinan untuk melanjutkan perundingan tidak ada. Belanda juga menyatakan bahwa Pemerintah Federal Sementara tetap akan berfungsi tanpa menanti ikut sertanya RI.

KTN berpendapat, bahwa keterangan dasar di bawah ini antara lain akan dipergunakan sebagai dasar perundingan untuk penyelesaian politik, yaitu sebagai berikut.

- a. Kedaulatan atas Hindia Belanda seluruhnya ada dan akan tetap berada di tangan Kerajaan Belanda sampai waktu yang ditetapkan. Kerajaan Belanda akan menyerahkan kedaulatan ini kepada NIS. Sebelum masa perlitan demikian itu habis temponya, Kerajaan Belanda dapat menyerahkan hak-hak, kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab kepada pemerintah federal sementara yang dibentuk dari daerah-daerah yang nantinya akan merupakan NIS. Jika sudah terbentuk, NIS akan merupakan negara yang berdaulat dan merdeka berkedudukan sejajar dengan Kerajaan Belanda dalam Uni Belanda Indonesia, dikepalai oleh Turunan Raja Beeland. Hal status RI adalah sebagai negara yang bergabung dalam NIS.
- b. Dalam pemerintahan federal sementara, sebelum diadakan perubahan dalam undang-undang NIS, kepada negara-negara bagian akan diberikan perwakilan yang adil.

- c. Sebelum KTN dibubarkan, tiap-tiap pihak boleh meminta supaya pekerjaan komisi diteruskan, yaitu guna membantu menyelesaikan perselisihan berkenaan dengan penyelesaian politik, yang mungkin terbit selama masa peralihan. Pihak yang lainnya tidak boleh berkeberatan atas permintaan demikian itu, permintaan tersebut harus dimajukan oleh pemerintah Belanda kepada Dewan Keamanan.
- d. Dalam waktu tidak kurang dari 6 bulan tapi tidak lebih dari satu tahun sesudah persetujuan ini ditandatangani, maka di daerah-daerah di Jawa, Sumatera dan Madura akan diadakan pemungutan suara untuk menentukan apakah rakyat di daerah benar-benar tersebut akan turut dalam RI atau masuk bagian yang lain di dalam lingkungan NIS. Plebisit ini diadakan dibawah pengawasan KTN, jika kedua pihak dapat persetujuan dalam artikel 3 yang menentukan, supaya KTN memberikan bantuan dalam soal tersebut. Kemungkinan tetap terbuka jika kedua pihak dapat persetujuan akan menggunakan cara lain dari pemungutan suara untuk menyatakan kehendak rakyat di daerah-daerah itu.
- e. Sesudah ditetapkan batas-batas negara-negara bagian yang dimaksud itu, maka akan diadakan rapat pembentukan undang-undang dasar menurut cara demokrasi, untuk menetapkan konstitusi buat NIS. Wakil-wakil dari negara-negara bagian akan mewakili seluruh rakyat.
- f. Jika ada negara bagian memutuskan tidak akan turut serta menandatangani konstitusi tersebut sesuai dengan pasal c dan d dalam persetujuan

Linggarjati, kedua pihak tidak akan keberatan diadakan perundingan untuk menetapkan perhubungan istimewa dengan NIS.

Itulah isi dari Persetujuan Renville yang merugikan RI sehingga P.M. Amir pun mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Kepungan Belanda atas ibukota RI melalui pendirian negara boneka di wilayah yang telah dikuasainya juga semakin rapat. Hal ini mengakibatkan jatuhnya kabinet pimpinan P.M. Amir (yang juga merupakan delegasi RI dalam Perundingan Renville).

Pada 13 Desember 1948 Hatta minta kepada Cochran agar perundingan bisa dibuka kembali. Hatta menyatakan bahwa RI bersedia mengakui hak veto Komisaris Tinggi Mahkota (kepala pemerintahan Hindia Belanda) dengan batas-batas tertentu. Empat hari kemudian Belanda memberikan jawaban yang ultimatif yang menuntut agar pihak RI menyetujui tuntutan-tuntutannya dalam waktu 18 jam. Ditegaskan pula bahwa RI dimasukkan ke dalam federasi dengan kedudukan sama dengan negara bagian lainnya. Waktu 18 jam bukanlah waktu yang panjang dan sangat singkat bagi RI untuk mempelajarinya.

Sesudah adanya perjanjian Renville maka atas dasar prinsip bahwa sebelum tanggal 1 Januari 1949 di Indonesia harus sudah terbentuk negara serikat atau negara federal, maka Belanda memandang bahwa perlu dipersiapkannya pemerintahan pra federal yang sejenis dengan pemerintahan peralihan. Republik Indonesia menolak rencana Belanda itu, sebab jiwa rencana tersebut tidak nasional tetapi kolonial. Karena RI tidak ikut, maka NIT semula tidak menyetujui pemerintahan semacam itu. Tetapi, setelah RI

menyatakan bahwa pada prinsipnya dapat menyetujui adanya pemerintahan federal (tetapi modal yang yang disodorkan Belanda memang tidak disetujui), dengan demikian munculah di atas panggung sejarah apa yang disebut Bijeemkomst Voor Federal Overleg (BFO) atau Badan permusyawaratan Federal, yang anggotanya adalah kepala- kepala daerah federal atas negara-negara boneka Belanda.

Tugas badan tersebut sebagai perantara mengoper tugas- tugas Hindia – Belanda kepada negara Indonesia serikat yang akan terbentuk pada tanggal 1 Januari 1949, yang menjadi ketuanya semula adalah Mr. Tengku Bakrim dari negara Sumatera Timur tetapi sejak Januari 1949 di ganti oleh Sultan Hamid.⁸

Dengan terbentuknya negara- negara Boneka, daerah- daerah otonom BFO yang memihak Belanda dan memusuhi RI, maka RI yang berpusat di Ibu kota Yogyakarta seolah- olah terjepit dengan wilayahnya yang makin menyempit. Tetapi warga negara RI yang masih setia yang jumlahnya puluhan juta dan tersebar di mana-mana termasuk di daerah- daerah yang dikuasai Belanda tetap mempertahankan eksistensi RI. Berkat kesetiaan, semangat, dan perjuangan warganegaranya itu, maka RI tetap bertahan.

B. Agresi Militer Belanda Kedua

Dalam perundingan, Belanda bermaksud memaksakan kehendaknya mengenai bentuk ketatanegaraan di Indonesia. Di dalam kehendak Belanda

⁸ Pitono.R, *Sejarah Indonesia Jilid III*, Malang: Penerbit Utama.1970 ,hlm.76.

itu terkandung janji yang menyatakan kesanggupan Belanda memberi kemerdekaan kepada bangsa Indonesia di kelak kemudian, tetapi janji tersebut akan dipenuhi sesudah berlangsungnya zaman peralihan yang tidak ada batas waktunya.

Zaman peralihan tersebut kedaulatan Indonesia tetap berada di tangan Belanda, Belanda telah sampa mendirikan organisasi ketatanegaraan yang baru dengan negara- negara boneka di dalamnya.Terhadap konsepsi serta langkah Belanda yang merugikan itu Republik bersikap menolak dengan tegas. Setelah perundingan mengalami kegagalan, Belanda mengirimkan sebuah misi yang di ketuai oleh Stiker dengan maksud, agar pertikaian antar Indonesia dengan Belanda tidak diselesaikan dengan delegasi tetapi dengan pertemuan langsung antara pemerintah Belanda dengan pemerintah Republik.⁹

Tanggal 18 Desember 1948 pukul 23.30, siaran radio antara dari Jakarta menyebutkan, bahwa besok paginya Wakil Tinggi Mahkota Belanda, Dr. Beel, akan mengucapkan pidato yang penting. Sementara itu Jenderal Spoor yang telah berbulan-bulan mempersiapkan rencana pemusnahan TNI memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai penyerangan terhadap kubu Republik. Operasi tersebut dinamakan "Operasi Kraai."

⁹ Soegiyono, *Kisah Djatukaja Ibu Kota Republik Indonesia* Yogyakarta, Yogyakarta: Badan Penerbit Nusantara, 1953, hlm.2.

Pukul 2.00 pagi *1e para-compagnie* (pasukan para I) KST di Andir memperoleh parasut mereka dan memulai memuat keenambelas pesawat transportasi, dan pukul 3.30 dilakukan briefing terakhir. Pukul 3.45 Mayor Jenderal Engles tiba di bandar udara Andir, diikuti oleh Jenderal Spoor 15 menit kemudian. Dia melakukan inspeksi dan mengucapkan pidato singkat. Pukul 4.20 pasukan elit KST di bawah pimpinan Kapten Eekhout naik ke pesawat dan pukul 4.30 pesawat Dakota pertama tinggal landas. Rute penerbangan ke arah timur menuju Maguwo diambil melalui Lautan Hindia. Pukul 6.25 mereka menerima berita dari para pilot pesawat pemburu, bahwa zona penerjunan telah dapat dipergunakan. Pukul 6.45 pasukan para mulai diterjunkan di Maguwo.

Seiring dengan penyerangan terhadap bandar udara Maguwo, pagi hari tanggal 19 Desember 1948, WTM Beel berpidato di radio dan menyatakan, bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan Persetujuan Renville. Penyerbuan terhadap semua wilayah Republik di Jawa dan Sumatera, termasuk serangan terhadap Ibukota RI, Yogyakarta, yang kemudian dikenal sebagai Agresi Militer Belanda II telah dimulai. Belanda konsisten dengan menamakan agresi militer ini sebagai "Aksi Polisional".

Sementara Belanda secara sepihak melanjutkan dengan penyelesaian federal mereka, perundingan-perundingan antara mereka dan pihak RI otomatis terhenti. Hatta tidak bersedia mengabulkan keinginan Belanda yang menuntut agar pihak Belanda yang bertanggung jawab atas keamanan di dalam negeri selama masa peralihan. Belanda juga memberikan pilihan agar

tentara RI diintegrasikan ke dalam tentara federal. Kebuntuan pun mulai muncul dan menimbulkan keadaan yang gawat dan membahayakan bagi gencatan senjata antara kedua belah pihak.

Tuntutan-tuntutan Belanda atas RI semakin kuat dan menekan. Belanda menuntut pembubaran TNI, salah satu atribut kedaulatan dan kemerdekaan RI yang utama itu. Belanda sangat tangkas melancarkan perang totalnya, walaupun dalam kondisi gencatan senjata. Mereka terus menyerang pada bidang politik dan ekonomi untuk meruntuhkan Republik Indonesia.¹⁰

Kebuntuan antara kedua belah pihak mengantarkan Belanda kepada aksi militer yang dilancarkan pada tanggal 19 Desember 1948. Serangan militer tersebut dikenal dengan sebutan Agresi Militer Belanda Kedua. Sekitar pukul 06.00 kapal-kapal terbang Belanda mulai menyerang Yogyakarta. Mereka membom lapangan udara Maguwo dan menembaki jalan-jalan raya, asrama-asrama tentara dan gedung-gedung pemerintah.

Penyerangan terhadap Ibukota Republik, diawali dengan pemboman atas lapangan terbang Maguwo, di pagi hari. Pukul 05.45 lapangan terbang Maguwo dihujani bom dan tembakan mitraliur oleh 5 pesawat Mustang dan 9 pesawat Kittyhawk. Pertahanan TNI di Maguwo hanya terdiri dari 150 orang pasukan pertahanan pangkalan udara dengan persenjataan yang sangat minim, yaitu beberapa senapan dan satu senapan anti pesawat 12,7. Senjata berat

¹⁰ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 9 Agresi Militer Belanda II*. Bandung : Disejarah dan Angkasa, 1979, hlm.165.

sedang dalam keadaan rusak. Pertahanan pangkalan hanya diperkuat dengan satu kompi TNI bersenjata lengkap. Pukul 06.45, 15 pesawat Dakota menerjunkan pasukan KST Belanda di atas Maguwo. Pertempuran merebut Maguwo hanya berlangsung sekitar 25 menit. Pukul 7.10 bandara Maguwo telah jatuh ke tangan pasukan Kapten Eekhout. Di pihak Republik tercatat 128 tentara tewas, sedangkan di pihak penyerang, tak satu pun jatuh korban.

Sekitar pukul 9.00, seluruh 432 anggota pasukan KST telah mendarat di Maguwo, dan pukul 11.00, seluruh kekuatan Grup Tempur M sebanyak 2.600 orang termasuk dua batalyon, 1.900 orang, dari Brigade T- beserta persenjataan beratnya di bawah pimpinan Kolonel D.R.A. van Langen telah terkumpul di Maguwo dan mulai bergerak ke Yogyakarta.

Serangan terhadap kota Yogyakarta juga dimulai dengan pemboman serta menerjunkan pasukan payung di kota. Di daerah-daerah lain di Jawa antara lain di Jawa Timur, dilaporkan bahwa penyerangan bahkan telah dilakukan sejak tanggal 18 Desember malam hari. Segera setelah mendengar berita bahwa tentara Belanda telah memulai serangannya, Panglima Besar Soedirman mengeluarkan perintah kilat yang dibacakan di radio tanggal 19 Desember 1948 pukul 08.00.

Setelah berhasil menguasai Maguwo, pasukan Belanda beralih ke sasaran yang lain, yakni Kota Yogyakarta. Walaupun perlawanannya dari pihak Republik sangat kecil namun setidaknya perlawanannya tersebut dapat memperlambat gerak pasukan Belanda. Sementara pasukan Belanda sibuk

melakukan gerakan ke kota, di tempat kediaman Presiden Soekarno anggota kabinet Republik berkumpul mengadakan sidang darurat.

Menjelang pukul 08.30 Korps Pasukan Khusus lengkap berada di Maguwo, dan pasukan Belanda dapat mulai gerakannya menuju Yogyakarta. Kota Yogyakarta terletak 7 KM sebelah barat Maguwo menuju Yogyakarta. Jalan lama adalah yang terpenting, yaitu jalan dari Solo ke Yogyakarta. Agak di sebelah selatan lapangan terbang terdapat jalan Wonosari-Yogyakarta yang dapat langsung menuju pusat kota. Kedua jalan ini digunakan pasukan Belanda dalam gerakan ini. Rute utara digunakan separuh pasukan khusus dan 1-15 RI, batalyon dari Brigade T yang baru dibentuk. Sisa pasukan khusus yang lain menerobos ladang dan kampung sebelah selatan lapangan terbang menuju jalan Wonosari-Yogyakarta.¹¹

Dalam sidang kabinet RI di Istana Presiden, Soekarno memutuskan untuk menyerahkan diri secara terhormat. Dengan demikian para menteri kemudian memutuskan untuk mengangkat rekan mereka Menteri Sjafruddin Prawiranegara sebagai pemimpin pemerintah darurat. Sjafruddin pada saat itu sedang berada di Bukit Tinggi, ibu kota Republik di Sumatera. Selain itu Hatta masih membuat pernyataan resmi untuk urusan militer. Pernyataan ini atas desakan Kolonel Simatupang berisi perintah kepada tentara untuk melanjutkan perjuangan, apa pun yang terjadi dengan pemerintah.

¹¹ Pierre Heijboer, *Agresi Militer Belanda Memperebutkan Pending Zamrud Sepanjang Khatulistiwa 1945/1949*. Jakarta : Grasindo, 1998, hlm. 143.

Dengan demikian secara garis besar hasil dari Sidang Kabinet pada saat itu memutuskan sebagai berikut:

1. Soekarno, Hatta dan beberapa anggota Kabinet yang lain tetap tinggal di Gedung Negara supaya ditangkap Belanda, agar opini dunia akan bersimpati kepada RI
2. Memberikan mandat kepada Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatera untuk mendirikan Pemerintahan Darurat RI (PDRI) di Bukit Tinggi, Sumatera Barat
3. Tentara melanjutkan perjuangan gerilya dibawah pimpinan Panglima Besar Soedirman
4. Menteri Negara Koordinator Keamanan, Sri Sultan tetap tinggal di kota.

Akhirnya pada tanggal 20 Desember 1948 Soekarno harus menghadapi panglima pasukan-pasukan Belanda di Jawa Tengah, Jenderal Meijer. Jenderal ini meminta kepada Soekarno supaya mengeluarkan perintah penghentian tembak-menembak kepada TNI yang ditolak mentah-mentah oleh Soekarno karena ia kini berstatus sebagai tawanan yang tidak bisa memberikan perintah kepresidenannya.¹²

Dua hari kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Desember 1948, Soekarno, Hatta, Syahrir, Mr. Assaat, Mr. Ali Sasstroamidjojo dan Komodor Udara Suriadarma diterbangkan menuju pulau Bangka. Di sana Soekarno,

¹² Ide Anak Agung Gde Agung, *Renville*. Jakarta : Sinar Harapan, 1983, hlm. 210.

Syahrir dan Salim dipisahkan dari yang lainnya dan diterbangkan ke Brastagi, kemudian kelak ke Prapat, Danau Toba (Sumatera Utara).¹³

Dengan demikian usaha untuk mempertahankan kedaulatan RI terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama berada di Sumatera oleh Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan rekan-rekannya dalam memimpin PDRI, dimana mereka tetap berhubungan dengan TNI yang bergerilya. Kelompok kedua adalah TNI yang melakukan gerilya dibawah komando Pangsar Soedirman di pedalaman-pedalaman yang dibantu oleh segenap penduduk desa. Kelompok ketiga adalah para diplomat yang berada di luar negeri untuk memperjuangkan secara diplomasi, diantaranya adalah L.N. Palar, sedangkan kelompok berikutnya adalah Sri Sultan dan rakyat Yogyakarta yang tetap tinggal di Ibukota sebagai “penjaga gawang” untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI.

Sementara itu ibukota Republik yang telah dikuasi Belanda membuat Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan (yang juga merangkap Menteri Koordinator Keamanan) dan wakil kepala daerah Paku Alam VIII meletakkan jabatannya. Hal ini dimaksudkan agar segala hal yang terjadi di Yogyakarta adalah tanggung jawab Belanda yang telah menguasainya. Sri Sultan juga menginstruksikan kepada para pegawai Pamong Praja supaya membantu TNI

¹³ G.M. Kahin, Nationalism and Revolution In Indonesia, a.b. Nin Bakdi Soemanto, *Refleksi Pergmulan Lahirnya Republik : Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*. Jakarta : UNS Press dan Pustaka Harapan, 1995, hlm. 428.

yang akan berfungsi sebagai pemerintahan militer.¹⁴ Instruksi ini juga sekaligus merupakan persiapan untuk mengadakan perlawanan gerilya yang akan dilakukan oleh pamong praja dibawah pimpinan Sri Sultan.

Ibukota RI kini dikuasai Belanda, TNI bergerilya dan pucuk pimpinan negara ditawan. Satu-satunya anggota kabinet RI yang berada di Yogyakarta adalah Sri Sultan, hal ini wajar karena Sri Sultan juga merupakan pemimpin tradisional di wilayah itu dan tidak mungkin meninggalkan rakyatnya. Terakhir kali bertemu langsung dengan anggota kabinet yang lain adalah pada saat sebelum sidang kabinet bersamaan dengan Agresi Militer Belanda. Sri Sultan pun tak diijinkan oleh Belanda untuk menemui Soekarno dan pemimpin-pemimpin yang lain sebelum mereka dibawa untuk ditawan Belanda.

C. Serangan Umum 1 Maret 1949

Serangan Umum 1 Maret 1949 adalah serangan yang dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta secara secara besar-besaran yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi III/GM III dengan mengikutsertakan beberapa pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Besar

¹⁴ Pranoedjoe Poespaningrat, *Kisah Para Leluhur dan yang Diluhurkan dari Mataram Kuno sampai Mataram Baru*. Jakarta : PB. Kedaulatan Rakyat, 1998 hlm. 213.

Sudirman, untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI berarti juga Republik Indonesia masih ada dan cukup kuat, sehingga dengan demikian dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perundingan yang sedang berlangsung di Dewan Keamanan PBB dengan tujuan utama untuk mematahkan moral pasukan Belanda serta membuktikan pada dunia internasional bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) masih mempunyai kekuatan untuk mengadakan perlawanan. Soeharto pada waktu itu sebagai komandan brigade X/Wehrkreis III turut serta sebagai pelaksana lapangan di wilayah Yogyakarta.

Kurang lebih satu bulan setelah Agresi Militer Belanda II yang dilancarkan pada bulan Desember 1948, TNI mulai menyusun strategi guna melakukan pukulan balik terhadap tentara Belanda yang dimulai dengan memutuskan telepon, merusak jalan kereta api, menyerang konvoi Belanda, serta tindakan sabotase lainnya.

Belanda terpaksa memperbanyak pos-pos disepanjang jalan-jalan besar yang menghubungkan kota-kota yang telah diduduki. Hal ini berarti kekuatan pasukan Belanda tersebar pada pos-pos kecil diseluruh daerah republik yang kini merupakan medan gerilya. Dalam keadaaan pasukan Belanda yang sudah terpencar-pencar, mulailah TNI melakukan serangan terhadap Belanda.

Sekitar awal Februari 1948 di perbatasan Jawa Timur, Letkol. dr. Wiliater Hutagalung-yang sejak September 1948 diangkat menjadi Perwira Teritorial dan ditugaskan untuk membentuk jaringan persiapan gerilya di

wilayah Divisi II dan III - bertemu dengan Panglima Besar Sudirman guna melaporkan mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB dan penolakan Belanda terhadap resolusi tersebut dan melancarkan propaganda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Melalui Radio Rimba Raya, Panglima Besar Sudirman juga telah mendengar berita tersebut. Panglima Besar Sudirman menginstruksikan untuk memikirkan langkah-langkah yang harus diambil guna meng-counter propaganda Belanda.¹⁵

Hutagalung yang membentuk jaringan di wilayah Divisi II dan III, dapat selalu berhubungan dengan Panglima Besar Sudirman, dan menjadi penghubung antara Panglima Besar Sudirman dengan Panglima Divisi II, Kolonel Gatot Subroto dan Panglima Divisi III, Kol. Bambang Sugeng. Selain itu, sebagai dokter spesialis paru, setiap ada kesempatan, ia juga ikut merawat Panglima Besar Sudirman yang saat itu menderita penyakit paru-paru. Setelah turun gunung, pada bulan September dan Oktober 1949, Hutagalung dan keluarga tinggal di Paviliun rumah Panglima Besar Sudirman di (dahulu) Jl. Widoro No. 10, Yogyakarta.¹⁶

Pemikiran yang dikembangkan oleh Hutagalung adalah, perlu meyakinkan dunia internasional terutama Amerika Serikat dan Inggris, bahwa Negara Republik Indonesia masih kuat, ada pemerintahan (Pemerintah Darurat Republik Indonesia-PDRI), ada organisasi TNI dan ada tentaranya.

¹⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Serangan_Umum_1_Maret_1949

¹⁶ Heijbroer, Pierre. *Agresi Militer Belanda*. Jakarta: Gramedia Widiarsana, 1998.hlm.78.

Untuk membuktikan hal ini, maka untuk menembus isolasi, harus diadakan serangan spektakuler, yang tidak bisa disembunyikan oleh Belanda, dan harus diketahui oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) dan wartawan-wartawan asing untuk disebarluaskan ke seluruh dunia. Untuk menyampaikan kepada UNCI dan para wartawan asing bahwa Negara Republik Indonesia masih ada, diperlukan pemuda-pemuda berseragam Tentara Nasional Indonesia, yang dapat berbahasa Inggris, Belanda atau Perancis. Panglima Besar Sudirman menyetujui gagasan tersebut dan menginstruksikan Hutagalung agar mengkoordinasikan pelaksanaan gagasan tersebut dengan Panglima Divisi II dan III.

Letkol. dr. Hutagalung masih tinggal beberapa hari guna membantu merawat Panglima Besar Sudirman, sebelum kembali ke markasnya di Gunung Sumbing. Sesuai tugas yang diberikan oleh Panglima Besar Sudirman, dalam rapat Pimpinan Tertinggi Militer dan Sipil di wilayah Gubernur Militer III, yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1949 di markas yang terletak di lereng Gunung Sumbing. Selain Gubernur Militer/Panglima Divisi III Kol. Bambang Sugeng, dan Letkol Wiliater Hutagalung, juga hadir Komandan Wehrkreis II, Letkol. Sarbini Martodiharjo, dan pucuk pimpinan pemerintahan sipil, yaitu Gubernur Sipil, Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro, Residen Banyumas R. Budiono, Residen Kedu Salamun, Bupati Banjarnegara R. A. Sumitro Kolopaking dan Bupati Sangidi.

Letkol Wiliater Hutagalung yang pada waktu itu juga sebagai penasihat Gubernur Militer III menyampaikan gagasan yang telah disetujui

oleh Panglima Besar Sudirman, dan kemudian dibahas bersama-sama yaitu berikut ini.

1. Serangan dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Divisi III, yang melibatkan *Wehrkreise* I, II dan III.
2. Menggerahkan seluruh potensi militer dan sipil di bawah Gubernur Militer III.
3. Mengadakan serangan spektakuler terhadap satu kota besar di wilayah Divisi III,
4. Harus berkoordinasi dengan Divisi II agar memperoleh efek lebih besar,
5. Serangan tersebut harus diketahui dunia internasional, untuk itu perlu mendapat dukungan dari.
 - a. Wakil Kepala Staf Angkatan Perang guna koordinasi dengan pemanca radio yang dimiliki oleh AURI dan Koordinator Pemerintah Pusat.
 - b. Unit PEPOLIT (Pendidikan Politik Tentara) Kementerian Pertahanan.

Tujuan utama dari ini rencana adalah bagaimana menunjukkan eksistensi TNI dan dengan demikian juga menunjukkan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional. Untuk menunjukkan eksistensi TNI, maka anggota UNCI, wartawan-wartawan asing serta para pengamat militer harus melihat *perwira-perwira yang berseragam TNI*. Setelah dilakukan pembahasan yang mendalam, *grand design* yang diajukan oleh Hutagalung disetujui, dan khusus mengenai "serangan spektakuler" terhadap satu kota besar, Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng bersikukuh, bahwa yang harus diserang secara spektakuler adalah Yogyakarta.

Tiga alasan penting yang dikemukakan Bambang Sugeng untuk memilih Yogyakarta sebagai sasaran utama adalah berikut ini.

1. Yogyakarta adalah Ibukota RI, sehingga bila dapat *direbut* walau hanya untuk beberapa jam, akan berpengaruh besar terhadap perjuangan Indonesia melawan Belanda.
2. Keberadaan banyak wartawan asing di Hotel Merdeka Yogyakarta, serta masih adanya anggota delegasi UNCI (KTN) serta pengamat militer dari PBB.
3. Langsung di bawah wilayah Divisi III/GM III sehingga tidak perlu persetujuan Panglima/GM lain dan semua pasukan memahami dan menguasai situasi/daerah operasi.

Selain itu sejak dikeluarkan Perintah Siasat tertanggal 1 Januari 1949 dari Panglima Divisi III/Gubernur Militer III, untuk selalu mengadakan serangan terhadap tentara Belanda, telah dilancarkan beberapa serangan umum di wilayah Divisi III/GM III. Seluruh Divisi III dapat dikatakan telah *terlatih* dalam menyerang pertahanan tentara Belanda.

Selain itu, sejak dimulainya perang gerilya, pimpinan pemerintah sipil dari mulai Gubernur Wongsonegoro serta para Residen dan Bupati, selalu diikutsertakan dalam rapat dan pengambilan keputusan yang penting dan kerjasama selama ini sangat baik. Oleh karena itu, dapat dipastikan dukungan terutama untuk logistik dari seluruh rakyat.

Selanjutnya dibahas, pihak-pihak mana serta siapa saja yang perlu dilibatkan. Untuk skenario seperti disebut di atas, akan dicari beberapa

pemuda berbadan tinggi dan tegap, yang lancar berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis dan akan dilengkapi dengan seragam perwira TNI dari mulai sepatu sampai topi. Mereka sudah harus siap di dalam kota, dan pada waktu penyerangan telah dimulai, mereka harus masuk ke Hotel Merdeka guna *menunjukkan diri* kepada anggota-anggota UNCI serta wartawan-wartawan asing yang berada di hotel tersebut.

Kolonel Wiyono, Pejabat Kepala Bagian PEPOLIT Kementerian Pertahanan yang juga berada di Gunung Sumbing akan ditugaskan mencari pemuda-pemuda yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, terutama yang fasih berbahasa Belanda dan Inggris.

Hal penting yang kedua adalah, dunia internasional harus mengetahui adanya Serangan Tentara Nasional Indonesia terhadap tentara Belanda, terutama terhadap Yogyakarta, Ibukota Republik. Dalam menyebarluaskan berita ini ke dunia internasional maka dibantu oleh Kol. T.B. Simatupang yang bermarkas di Pedukuhan Banaran, desa Banjarsari, untuk menghubungi pemancar radio Angkatan Udara RI (AURI) di Playen, dekat Wonosari, agar setelah serangan dilancarkan berita mengenai penyerangan besar-besaran oleh TNI atas Yogyakarta segera disiarkan.

Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, TB Simatupang lebih kompeten menyampaikan hal ini kepada pihak AURI daripada perwira Angkatan Darat. Diperkirakan apabila Belanda melihat bahwa Yogyakarta diserang secara besar-besaran, dipastikan mereka akan mendatangkan bantuan dari kota-kota lain di Jawa Tengah, dimana terdapat

pasukan Belanda yang kuat seperti Magelang, Semarang dan Solo. Jarak tempuh (waktu itu) Magelang-Yogya hanya sekitar 3-4 jam saja Solo - Yogya, sekitar 4-5 jam, dan Semarang-Yogya, sekitar 6-7 jam. Magelang dan Semarang (bagian Barat) berada di wilayah kewenangan Divisi III GM III, namun Solo, di bawah wewenang Panglima Divisi II/GM II Kolonel Gatot Subroto. Oleh karena itu, serangan di wilayah Divisi II dan III harus dikoordinasikan dengan baik sehingga dapat dilakukan operasi militer bersama dalam kurun waktu yang ditentukan, sehingga bantuan Belanda dari Solo dapat dihambat, atau paling tidak dapat diperlambat.¹⁷

Pimpinan pemerintahan sipil, Gubernur Wongsonegoro, Residen Budiono, Residen Salamun, Bupati Sangidi dan Bupati Sumitro Kolopaking ditugaskan untuk mengkoordinasi persiapan dan pasokan perbekalan di wilayah masing-masing. Pada waktu bergerilya, para pejuang sering harus selalu pindah tempat, sehingga sangat tergantung dari bantuan rakyat dalam penyediaan perbekalan. Selama perang gerilya, bahkan Camat, Lurah serta Kepala Desa sangat berperan dalam menyiapkan dan memasok perbekalan (makanan dan minuman) bagi para gerilyawan. Ini semua telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah militer setempat.

Untuk pertolongan dan perawatan medis, diserahkan kepada PMI. Peran PMI sendiri juga telah dipersiapkan sejak menyusun konsep Perintah

¹⁷ Marsoedi, Ch. *Peranan Militer dalam mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia di DIY*. Makalah untuk masyarakat Sejarawan Indonesia Cb. Yogyakarta:1988.hlm.12.

Siasat Panglima Besar. Dalam konsep Pertahanan Rakyat Total - sebagai pelengkap Perintah Siasat No. 1 - yang dikeluarkan oleh Staf Operatif (Stop) tanggal 3 Juni 1948, butir 8 menyebutkan: Kesehatan terutama tergantung kepada Kesehatan Rakyat dan P.M.I. karena itu evakuasi para dokter dan rumah obat mesti menjadi perhatian.

Walaupun dengan risiko besar, Sutarjo Kartohadikusumo, Ketua DPA yang juga adalah Ketua PMI (Palang Merah Indonesia), mengatur pengiriman obat-obatan bagi gerilyawan di front. Beberapa dokter dan staf PMI kemudian banyak yang ditangkap oleh Belanda dan ada juga yang mati tertembak sewaktu bertugas. Setelah rapat selesai, Komandan *Wehrkreise* II dan para pejabat sipil pulang ke tempat masing-masing guna mempersiapkan segala sesuatu, sesuai dengan tugas masing-masing. Kurir segera dikirim untuk menyampaikan keputusan rapat di Gunung Sumbing pada 18 Februari 1949 kepada Panglima Besar Sudirman dan Komandan Divisi II/Gubernur Militer II Kolonel Gatot Subroto.¹⁸

Sebagaimana telah digariskan dalam pedoman pengiriman berita dan pemberian perintah, perintah yang sangat penting dan rahasia, harus disampaikan langsung oleh atasan kepada komandan pasukan yang bersangkutan. Maka rencana penyerangan atas Yogyakarta yang ada di wilayah Wehrkreise I di bawah pimpinan Letkol. Suharto, akan disampaikan langsung oleh Panglima Divisi III Kolonel Bambang Sugeng. Kurir segera

¹⁸ Moedjanto,G. *Sekitar Serangan Umum 1 Maret 1949*.Yogyakarta: Makalah diskusi panel Universitas Janabadra.1999. hlm.122.

dikirim kepada Komandan Wehrkreise III/Brigade 10, Letkol. Suharto, untuk memberitahu kedatangan Panglima Divisi III serta mempersiapkan pertemuan. Diputuskan untuk segera berangkat sore itu juga guna menyampaikan *grand design* kepada pihak-pihak yang terkait. Ikut dalam rombongan Panglima Divisi selain Letkol. dr. Hutagalung, antara lain juga dr. Kusen (dokter pribadi Bambang Sugeng), Bambang Surono (adik Bambang Sugeng), seorang mantri kesehatan, seorang sopir dari dr. Kusen, Letnan Amron Tanjung (ajudan Letkol Hutagalung) dan beberapa anggota staf Gubernur Militer (GM) serta pengawal.

Pertama-tama rombongan singgah di tempat Kol. Wiyono dari PEPOLIT, yang bermarkas tidak jauh dari markas Panglima Divisi, dan memberikan tugas untuk mencari pemuda berbadan tinggi dan tegap serta fasih berbahasa Belanda, Inggris atau Prancis yang akan diberi pakaian perwira TNI. Menjelang sore hari, Panglima Divisi beserta rombongan tiba di Pedukuhan Banaran mengunjungi Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kol. Simatupang. Selain anggota rombongan Bambang Sugeng, dalam pertemuan tersebut hadir juga Mr. M. Ali Budiarjo, yang kemudian menjadi ipar Simatupang.

Simatupang pada saat itu dimohonkan untuk mengkoordinasi pemberitaan ke luar negeri melalui pemancar radio AURI di Playen dan di Wiladek, yang ditangani oleh Koordinator Pemerintah Pusat. Setelah Simatupang menyetujui rencana *grand design* tersebut, Panglima Divisi segera mengeluarkan instruksi rahasia yang ditujukan kepada Komandan

Wehrkreise I Kolonel Bachrun, yang akan disampaikan sendiri oleh Kol. Sarbini.

Brigade IX di bawah komando Letkol Achmad Yani, diperintahkan melakukan penghadangan terhadap bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tanggal 19 Februari 1949. Panglima Divisi dan rombongan meneruskan perjalanan, yang selalu dilakukan pada malam hari dan beristirahat pada siang hari, untuk menghindari patroli Belanda. Penunjuk jalan juga selalu berganti di setiap desa. Dari Banaran rombongan menuju wilayah Wehrkreise III melalui pegunungan Menoreh untuk menyampaikan perintah kepada Komandan Wehrkreis III Letkol. Suharto. Bambang Sugeng beserta rombongan mampir di Pengasih, tempat kediaman mertua Bambang Sugeng dan masih sempat berenang di telaga yang ada di dekat Pengasih (Keterangan dari Bambang Purnomo, adik kandung alm. Bambang Sugeng, yang kini tinggal di Temanggung). Pertemuan dengan Letkol. Suharto berlangsung di Brosot, dekat Wates. Semula pertemuan akan dilakukan di dalam satu gedung sekolah, namun karena kuatir telah dibocorkan, maka pertemuan dilakukan di dalam sebuah gubug di tengah sawah. Hadir dalam pertemuan tersebut lima orang, yaitu Panglima Divisi III/Gubernur Militer III Kol.

Bambang Sugeng, Perwira Teritorial Letkol. dr. Wiliater Hutagalung beserta ajudan Letnan Amron Tanjung, Komandan Wehrkreise III/Brigade X Letkol. Suharto beserta ajudan. Kepada Suharto diberikan perintah untuk mengadakan penyerangan antara tanggal 25 Februari dan 1 Maret 1949.

Kepastian tanggal baru dapat ditentukan kemudian, setelah koordinasi serta kesiapan semua pihak terkait, antara lain dengan Kol. Wiyono dari Pepolit Kementerian Pertahanan. Setelah semua persiapan matang, baru kemudian diputuskan (keputusan diambil tanggal 24 atau 25 Februari), bahwa serangan tersebut akan dilancarkan tanggal 1 Maret 1949, pukul 06.00 pagi. Instruksi segera diteruskan ke semua pihak yang terkait.

Puncak serangan dilakukan dengan serangan umum terhadap kota Yogyakarta (ibu kota negara) pada tanggal 1 Maret 1949, dibawah pimpinan Letnan Kolonel Suharto, Komandan Brigade 10 daerah Wehrkreise III, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.

Meskipun Sri Sultan Hamengkubuwono IX dikenai tahanan rumah oleh Belanda di Keraton, namun beliau tidak tinggal diam. Sri Sultan justru menunjukkan bahwa ia sangat mencintai Republik dan ingin segera mengusir Belanda yang telah bercokol lama sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaanya. Dengan adanya radio yang ada di Keraton membuat Sri Sultan leluasa mengikuti perkembangan internasional, khususnya mengenai perjuangan Indonesia dalam forum diplomasi di PBB.

Menurut berita yang didengar Sri Sultan, PBB akan mengadakan sidang mengenai masalah Indonesia-Belanda pada akhir Februari 1949. Dengan adanya berita tersebut maka kemudian timbulah suatu pemikiran dalam benak Sri Sultan untuk memberitahukan kepada dunia internasional bahwa RI tidak musnah seperti yang digambarkan oleh Belanda. Memang

Belanda semenjak menguasai Kota Yogyakarta selalu menggambarkan kepada pihak internasional bahwa RI telah hancur dan TNI telah musnah, padalah RI tetap berdaulat dengan pemerintahan darurat di Sumatera dan TNI tetap utuh dengan bergerilya ke pedalaman-pedalaman bersama pemimpinnya.

Tanggal 1 Maret 1949, pagi hari, serangan secara besar-besaran yang serentak dilakukan di seluruh wilayah Divisi III/GM III dimulai, dengan fokus serangan adalah Ibukota Republik, Yogyakarta, serta koar-besaran oleh pasukan Brigade X yang diperkuat dengan satu Batalyon dari Brigade IX, sedangkan serangan terhadap pertahanan Belanda di Magelang dan penghadangan di jalur Magelta-kota di sekitar Yogyakarta, terutama Magelang, sesuai Instruksi Rahasia yang dikeluarkan oleh Panglima Divisi III/GM III Kolonel Bambang Sugeng kepada Komandan Wehrkreis I, Letkol Bahrun dan Komandan Wehrkreis II Letkol Sarbini. Pada saat yang bersamaan, serangan juga dilakukan di wilayah Divisi II/GM II, dengan fokus penyerangan adalah kota Solo, guna mengikat tentara Belanda dalam pertempuran agar tidak dapat mengirimkan bantuan ke Yogyakarta.

Pos komando ditempatkan di desa Muto. Pada malam hari menjelang serangan umum itu, pasukan telah merayap mendekati kota dan dalam jumlah kecil mulai disusupkan ke dalam kota. Pagi hari sekitar pukul 06.00, sewaktu sirene dibunyikan serangan segera dilancarkan ke segala penjuru kota. Dalam penyerangan ini Letkol Soeharto langsung memimpin pasukan dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Sektor Timur dipimpin Ventje Sumual, sektor selatan dan timur dipimpin Mayor Sardjono, sektor utara oleh Mayor

Kusno. Sedangkan untuk sektor kota sendiri ditunjuk Letnan Amir Murtono dan Letnan Masduki sebagai pimpinan. TNI berhasil menduduki kota Yogyakarta selama 6 jam. Tepat pukul 12.00 siang, sebagaimana yang telah ditentukan semula pasukan TNI mengundurkan diri.

Serangan terhadap kota Solo yang juga dilakukan secara besar-besaran, dapat menahan Belanda di Solo sehingga tidak dapat mengirim bantuan dari Solo ke Yogyakarta, yang sedang diserang secara besar Yogyakarta yang dilakukan oleh Brigade IX, hanya dapat memperlambat gerak pasukan bantuan Belanda dari Magelang ke Yogyakarta. Tentara Belanda dari Magelang dapat menerobos hadangan gerilyawan Republik, dan sampai di Yogyakarta sekitar pukul 11.00.

Keberhasilan yang dicapai dalam Serangan 1 Maret 1949, membangkitkan semangat juang dan kepercayaan terhadap eksistensi TNI. Dengan kepercayaan tersebut, semangat juang rakyat akan tetap terjaga dan bersatu melawan Belanda, serta turut membantu TNI selama mengadakan perang Gerilya.